

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2011.
- _____. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisasi Sebagai Suatu Alternatif*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah*. UII Press, Jakarta. Philippus. 2006.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2010.
- HS, Salim dan Erlies SN. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke -1, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013.
- Kansil, CST dan Christine ST. Kansil. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2004.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Manan, Bagir. *Menyongong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Bandung. 2001.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2008.
- R, Wiyono. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Rasyid, Ryaas. *Otonomi Daerah Latar Belakang dan Masa depannya*. LIPI Press, Jakarta. 2007.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta. 2011.

Satoto, Sukamto. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Hanggar Kreator, Yogyakarta. 2004.

Sendjaja, Momon Soetisna dan Sjachran Basah. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Alumni, Bandung. 2000.

Sunarto, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika, Makasar. 2005.

Suprato, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Muatan)*. Konisius, Yogyakarta. 2007.

Artikel/Karya Ilmiah

Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Orasi Disertasi Unpar, Bandung, 1983.

Kausar AS, *Memantapkan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah*, Depdagri Republik Indonesia, Forum Koordinasi dan Konsultasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta, 26 Juli 2005.

Peraturan perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang tentang

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sampah;

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah;

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jambi dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Internet

Aloysius Hari Kristianto dan Pramatya Resindra Widya, “Pendampingan dan Pelatihan Pengelolaan Limbah Organik Menjadi Produk Bernilai Ekonomi di SMA Negeri 1 Bengkayang”, *Jurnal Abdimas BSI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, diakses melalui <http://ejournal.bsi.ac.id>

Anonim, *Bab 1 Pendahuluan*, <http://digilib.uinsby.ac.id/13161/2/Bab%201.pdf>, tanggal akses 02 September 2021.